



<https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>



@PPID Kabupaten Pesisir Selatan



@diskominfoessel



@Kominfo Pessel



@Kominfo Pesisir Selatan

RENCANA KERJA

TAHUN 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat - Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan akses Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2025, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun. Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Painan, 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PESIR
SELATAN,



WENDI, S.H., M. Hum

NIP. 1976040 199803 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima Tahun ke depan.

Rancangan awal perencanaan yang memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah di Tahun 2025 dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informatika, yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Komunikasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini adalah pedoman bagi Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025 dan untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasikan secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang komunikasi dan informatika.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2025;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan
5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Lembar : 1

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2 | Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 2 16 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | |
| 2 16 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan | 12 bulan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 2 16 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah | 12 bulan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 2 16 01 2.02 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen | 7 Dokumen | n/a | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|----------------|-----|----------|----------|------|----------------|----------------|------|
| | | | | | Perangkat Daerah | Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | | Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang/bulan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 34 Orang/bulan | 34 Orang/bulan | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | | Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kenutuhan administrasi Umum | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 7 Paket | 7 Paket | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 4 Paket | 4 Paket | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 4 Paket | 4 Paket | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 4 Paket | 4 Paket | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 60 Laporan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 60 Laporan | 60 Laporan | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 200 Laporan | 200 Laporan | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | 12 Laporan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--------------|-----|----------|----------|------|-------------|--------------|------|
| | | | | | | Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pelayanan umum kantor | 12 Laporan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | n/a | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Unit | 12 Unit | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 11 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 81 Unit | n/a | 81 Unit | 81 Unit | 100% | 81 Unit | 81 Unit | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | n/a | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 2 | 16 | 02 | | | Program Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 12 Dokumen | n/a | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 4500 Dokumen | n/a | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 4500Dokumen | 4500 Dokumen | 100% |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Sub Kegiatan Penyelenggaran Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau | 15 Dokumen | n/a | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------|-----|----------|----------|------|-----------|-----------|------|
| | | | | | Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah | 3 Dokumen | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan sebanyak 5 program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 8.161.252.498,- (Delapan milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 7.907.937.757 (Tujuh milyar Sembilan ratus tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 97%.

1. Program/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

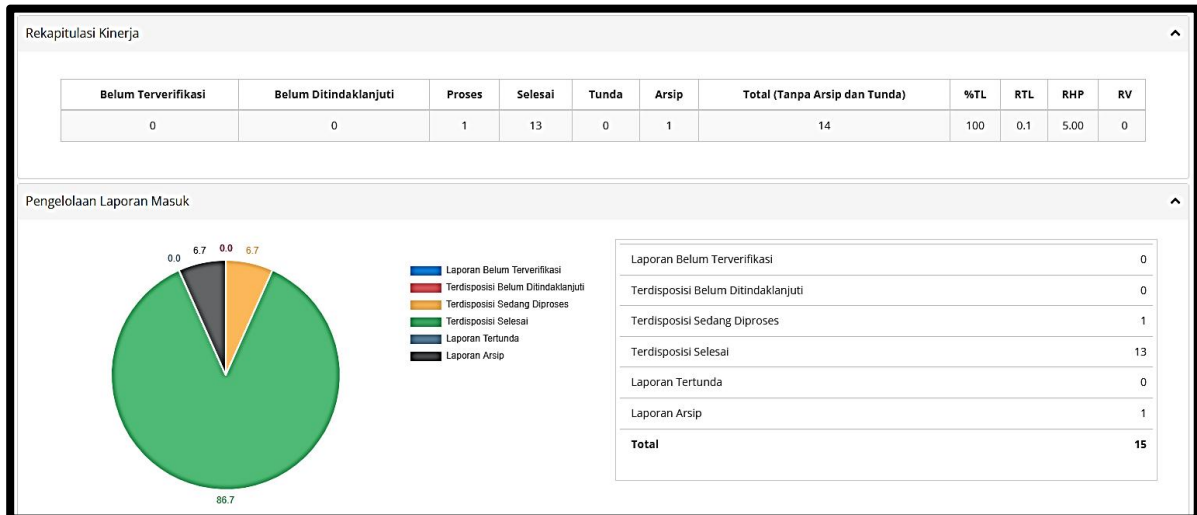
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- l. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- m. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- o. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- p. Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya

Pelaksanaan pada sub kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika, pencapaian kinerjanya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam target pada masing-masing sub kegiatan.

- q. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
- r. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- s. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan pada Bidang Aplikasi Informatika , capaian kinerja yang dicapai yaitu :

- Terjaganya stabilitas akses internet dan intranet di 41 Perangkat Daerah, 1 RSUD, 21 Puskesmas, dan 182 Nagari.
- Terselenggaranya kegiatan monitoring dan pengawasan *Base Transceiver Station* (BTS) dengan jumlah Menara Telekomunikasi sebanyak 204 yang tersebar di seluruh kabupaten pesisir selatan dengan tercapainya target PAD untuk retribusi daerah 100 % dari retribusi menara.
- Terselenggaranya akses internet gratis di 2 spot
- Terselenggaranya penyampaian informasi dalam bentuk video melalui videotron sampai saat ini.
- Terlaksananya pengawasan dan pemantauan CCTV pada titik-titik lokasi publik seperti daerah wisata dan perangkat daerah.
- Terkoneksinya jaringan internet melalui jaringan internet Fiber optik sebanyak 35 titik dengan ruang lingkup perkantoran di Kecamatan IV Jurai.
- Terkoneksinya jaringan internet melalui radio pemancar internet (Mini Tower) ke nagari-nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Dinas Komunikasi dan Informatika telah melayani pembuatan aplikasi serta pemeliharaan dan pengembangan pada aplikasi sebelumnya sebanyak 13 Aplikasi
- Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2023 melalui Aplikasi lapor.go.id :



- t. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- u. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

Pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Informasi Komunikasi Publik, capaian kinerja yang dicapai yaitu :

- PPID Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan juara 1 tingkat Propinsi Sumatera Barat. PPID Kabupaten Pesisir Selatan sudah enam kali berturut-turut menjadi juara 1 (Informatif).
- Terselenggaranya penyampaian pembangunan daerah Pesisir Selatan melalui Radio Langkisau FM maupun mobil keliling penerangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Terlaksananya penyampaian berita pembangunan daerah melalui media online sebanyak 19 Media dan terbinanya 121 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

- w. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Statistik dan Persandian, capaian kinerjanya yaitu :

- 25 Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2023
- 30 Buku Ringkasan Metadata Statistik

- x. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Bidang Statistik dan Persandian, capaian kinerjanya yaitu :

- Pembuatan Tanda Tangan Digital pada Tahun 2023 ini ditargetkan sebanyak 182 Nagari, yang telah terdaftar memiliki sertifikat elektronik di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

REKAP DATA SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG SUDAH TERBIT

| ASN | Sudah TTE | Belum TTE | Jumlah |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| ASN (eselon II – staf OPD) | 1.212 | 204 | 1.416 |
| ASN puskesmas | 730 | 82 | 812 |
| Perangkat Nagari (Wali dan Seknag) | 280 | 84 | 364 |
| Total | 2.222 | 370 | 2.592 |

- Jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 182 Nagari, yang sudah diterbitkan sertifikat elektronik Wali Nagari dan Sekretaris Nagari nya adalah sebanyak 280 pengguna dengan jumlah Wali Nagari dan Sekretarisnya adalah 364 orang, sedangkan yang belum melakukan pembuatan Sertifikat Elektronik berjumlah 84 orang, dan Nagari yang belum sama sekali melakukan penerbitan adalah 8 Nagari, diantaranya Nagari Barung-Barung Belantai Selatan, Nagari Kapuh, Nagari Nanggalo, Nagari Koto Berapak, Nagari Talaok, Nagari Kambang Timur, Nagari Palokan Inderapura, dan Nagari Teluk Ampalu Indera Pura.

2. Program/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023

Untuk program/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

3. Program/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada tahun 2023 .

Untuk program/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu dengan nilai 107%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.2 :
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--|--------------------|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja | Nilai AKIP Perangkat Daerah | A | A | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi | Indeks SPBE | 3,55 | 4,17 | 117% |
| 3 | Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan | Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 4,21 | 4,76 | 113% |
| 4 | Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik | Kategori Keterbukaan Informasi Publik | INFORMATIF (99,92) | INFORMATIF (97,20) | 97% |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah | Nilai Kematangan Inovasi PD | 100 | 100 | 100% |

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum beberapa faktor penyebab melebihi target kinerja program adalah :

Faktor internal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Komitmen pimpinan dan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2. Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
3. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program pengembangan sistem pelaporan sistem pencapaian kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

faktor eksternal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan
2. Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama OPD, maupun pihak swasta yang terlibat dalam pekerjaan bersama

3. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik).
4. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu Satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki berbagai program dan kegiatan khususnya dibidang komunikasi dan informatika, tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika tidak bisa lepas dari pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 tahun 2011 tentang petunjuk teknis standard pelayanan minimal. Untuk Mencapai target standar pelayanan minimal sesuai standar nasional, perlu didukung dengan upaya pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Komunikasi,

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat dengan format daerah masing-masing, tableT-C.30

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------------|-----|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | | | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 2 | Indeks SPBE | | | 3,40 | 3,55 | 3,75 | 3,90 | 3,48 | 4,17 | 3,55 | 3,75 | |
| 3 | Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | | - | 4,21 | 4,22 | 4,23 | - | 4,76 | 4,22 | 4,23 | |
| 4 | Kategori Keterbukaan Informasi Publik | | | <i>Infor matif (93)</i> | <i>Infor matif (99,9 2)</i> | <i>Infor matif (99,9 2)</i> | <i>Infor matif (99,9 2)</i> | <i>Inform atif (99,70)</i> | <i>Inform atif (97,20)</i> | <i>Inform atif (99,92)</i> | <i>Inform atif (99,92)</i> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|--|
| 5 | Nilai Kematangan Inovasi PD | | | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | |
|---|-----------------------------|--|--|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|--|

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan capaian target pengembangan Komunikasi dan Informatika, maka harus selalu memperhatikan elemen – elemen dalam tata kelola komunikasi, yakni sumber berita / informasi, penerima berita / informasi, substansi berita / informasi dan saluran berita / informasi yang terbingkai dalam sistem. Dari elemen – elemen tersebut, ternyata terdapat beberapa isu sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kekurangan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana. Dari segi sarana dan prasarana masih sangat kurang, khususnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung teknis kegiatan diseminasi informasi.
2. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu partner pemerintah dalam diseminasi informasi belum terbentuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu untuk periode ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan akan memfokuskan pada pembentukan KIM pada tingkat kecamatan.
3. Belum maksimalnya hasil kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan kurangnya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan teknis.
4. Kurangnya maksimalnya pemahaman aparatur dibidang statistik sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan. Statistik sektoral adalah salah satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal penyediaan data statistik sektoral belum terlaksana dengan baik karena sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas ini belum terpenuhi baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu ke depan peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur yang menangani statistik sektoral menjadi fokus perhatian selain penyediaan data.

5. Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik aparatur yang memiliki kualifikasi sandi, tempat kegiatan persandian dan peralatan persandian. Belum terciptanya koordinasi yang handal antara lintas sektoral dalam melaksanakan program / kegiatan.
6. Substansi berita / informasi yang disampaikan masih kekurangan sinkron dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna antara Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah komunikasi dan infromatika merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada kebijakan nasional membangun sektor telekomunikasi dan tata kelola internet sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yang mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 dan diharapkan dapat dijadikan acuan secara konsisten sehingga sasaran pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika masalah sosial dan budaya tetap diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan ekonomi digital dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kondisi lokal dan penggunaan teknologi yang sudah dibangun. Dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dari segala aspek pembangunan daerah. Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah. Terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memasukkan dalam program/kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah merumuskan strategi pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
3. Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan

4. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
5. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran arah dan tujuan perencanaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2. Untuk memudahkan para pelaksana dalam melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi perencanaan kegiatan-kegiatan.
3. Sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kabupaten.

2. Sasaran

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan nilai AKIP memuaskan
- b. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dengan meningkatnya Indeks SPBE, dan efektifnya penerapan e government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.
- c. Meningkatnya Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan dengan Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- d. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dengan Kategori Keterbukaan Informasi Publik Memuaskan
- e. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Inovasi PD

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 mendukung prioritas pembangunan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025**

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA) | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000) | SUMBER DANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DISKOMINFO | 7 Dokumen | 34,700,00 | |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <u>Sub Kegiatan</u> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | DISKOMINFO | 34 Orang/Bulan | 3,415,731,00 | APBD |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | DISKOMINFO | 12 Dokumen | 123.240,00 | APBD |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <u>Sub Kegiatan</u> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------|-------------|------------|------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | DISKOMINFO | 7 Paket | 10.496,00 | APBD |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | DISKOMINFO | 7 Paket | 240.600,00 | APBD |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | DISKOMINFO | 4 Paket | 30.000,00 | APBD |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | DISKOMINFO | 4 Paket | 25.941,00 | APBD |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | DISKOMINFO | 12 Dokumen | 5.400,00 | APBD |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | DISKOMINFO | 60 Laporan | 16.250,00 | APBD |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DISKOMINFO | 200 Laporan | 125.325,00 | APBD |
| - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <u>Sub Kegiatan</u> | | | | | |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | DISKOMINFO | 2 Unit | 50.000,00 | APBD |
| - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <u>Sub Kegiatan</u> | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | DISKOMINFO | 12 Laporan | 158.645,00 | APBD |
| - | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|------------|------|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | DISKOMINFO | 12 Laporan | 76.570,00 | APBD |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <u>Sub Kegiatan</u> | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | DISKOMINFO | 12 Unit | 208.234,00 | APBD |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | DISKOMINFO | 1 Unit | 23.660,00 | APBD |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | DISKOMINFO | 1 Unit | 26.000,00 | APBD |
| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kegiatan | | | | | |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <u>Sub Kegiatan</u> | Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah | | | | |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kab. Pessel | 12 Media | 265.000,00 | APBD |
| Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | Kab. Pessel | 8000 Dokumen | 190.761,00 | APBD |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | Kab. Pessel | 15 Dokumen | 265.306,00 | APBD |

| | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------|------|
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan | Peningkatan Pelayanan E Government | | | | |
| Pengelolaan e government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan e government | | | | |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Pessel | 2 Dokumen | 320.000,00 | APBD |
| Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | Kab. Pessel | 5 Unit | 82.000,00 | APBD |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kab. Pessel | 12 Dokumen | 50.000,00 | APBD |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | |
| Kegiatan | Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemda Pessel | | | | |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| Sub Kegiatan | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | umlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kab. Pessel | 1 Dokumen | 74.000,00 | APBD |
| Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegras | Kab. Pessel | 55 Orang | 25.476,00 | APBD |
| Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | Kab. Pessel | 12 Dokumen | 62.000,00 | APBD |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|---------------------|------|
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | Kab. Pessel | 41 OPD | 69.000,00 | APBD |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | Persentase Penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | | | | |
| Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| <u>Sub Kegiatan</u> | | | | | |
| Penetapan Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Kab. Pessel | 3 Dokumen | 72.000,00 | APBD |
| Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kab. Pessel | 5 Laporan | 84.000,00 | APBD |
| J U M L A H | | | | 9.052.212,00 | |

BAB V

PENUTUP

Hasil evaluasi atas Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99 % atau dapat dikategorikan baik.

Tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Tahun 2025 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Diskominfo yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan atas berbagai pertimbangan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR